

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT

Asfarony Hendra Nazwin¹, Nabila Alfauziah²
asfarony@ummat.ac.id¹, nabilaalfauziah54@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Kurangnya perhatian dari Pemerintah dalam mempertimbangkan aspirasi masyarakat kecamatan dan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan latar belakang maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemerintah pemberdayaan desa di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, kinerja dan efektivitas dalam memberikan layanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, tahapan analisis data yang menjelaskan tahapan analisis pada penelitian deskriptif Kualitatif, adalah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan Pemerintah Desa di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima masih belum maksimal hal ini disebabkan disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah terhadap desa terhadap masyarakat. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak ada di dalamnya diketahui oleh Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pelayanan, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

less attention from the Government in considering the subdistrict aspirational society and in meeting the needs of communities make communities living in poverty. Based on the background of the objectives in this research is to know how the Government's empowerment villages in Ngali district Belo District Bima, performance and effectiveness in order to provide the service. Research methods used in this research is descriptive qualitative. Method of collecting Data through: interviews, documentation, the stages of data analysis that explains the stages of analysis on the research of Qualitative Deskritif, as follows: reduction of data (data reduction), the presentation of the Data, draw conclusions. The results showed the Government's Empowerment villages in district Ngali district Belo District Bima still hasn't been fullest it is caused due to the lack of Government attention to the village against society. So what is the needs of the community are not in the know by the Government of the village.

Keywords: Empowerment, service, Government of the village.

PENDAHULUAN

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem Pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan di Indonesia mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem Pemerintahan Desa diseragamkan lewat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pembagian wilayah Pemerintahan baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Desa sebetulnya lebih ditunjukkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan sebuah pelayanan publik dimasing-masing desa, baik daerah yang kondisinya berkrakteristik daratan maupun kepulauan harus mampu mewujudkan tujuan tersebut.

Pemberdayaan Pemerintah Desa khususnya di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, bisa dikategorikan belum bisa memuaskan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena masih didapati masalah yang masih perlu diatasi. Misalnya dalam perencanaan program pembangunan pemerintah Desa Ngali Kecamatan Belo

Kabupaten Bima masih belum terlaksanakan dengan baik karena kurang memperhatikan kondisi desa, kurangnya kebijakan dalam mempertimpangkan aspirasi masyarakat dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat masih belum maksimal atau masih kurang memuaskan. Serta kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap ekonomi masyarakatnya, mengingat hal ini didasari dengan mata pencaharian penduduk Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagian besar adalah petani dan pedagang, karena sebagian besar masyarakat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima terletak di wilayah pesisir gunung dan luasnya lahan pertanian maupun perkebunan.

Masih tidak ada peningkatan penghasilan yang mengakibatkan pemerintah Desa tidak semangat kerja, atau sarana dan prasarana belum maksimal, sehingga menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Maka sangat diharapkan pemberdayaan Pemerintah Desa ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat Desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya, dengan demikian diharapkan bahwa aparat Pemerintahan Desa, khususnya pemerintah Desa di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat

Dari pembahasan diatas bahwa masalah yang terjadi diakibatkan karena pemberdayaan Pemerintah Desa yang belum baik, sehingga menyebabkan pelayanan yang kurang memperhatikan atau memuaskan masyarakat desa, serta terjadinya keterlambatan dalam pembangunan desa. Maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi bagaimana "Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti di lapangan, terungkap bahwa pemerintah Desa di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sudah bekerja dengan sebisa mungkin. Untuk mengukur produktifitas kinerja pemerintah Desa, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang dikutip dari teori Suwignyo (1985) untuk menjadi bahan pertanyaan dalam penelitian, yaitu;

1. Bimbingan latihan kerja, guna indikator pemberdayaan ini untuk mengetahui apakah pemerintah Desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Peningkatan penghasilan pada indikator ini untuk mengetahui bagaimana semangat aparatur Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
3. Melengkapi sarana dan prasarana, hal ini sangat dibutuhkan agar pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pertama, Untuk mengukur kinerja yang dilakukan pemerintah Desa di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. maka peneliti menggunakan beberapa indikator dari

teori Suwignyo. Yaitu, jika dilihat dari indikator bimbingan latihan kerja, berdasarkan dari informan pemerintah Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sudah menerima atau sudah mendapatkan bimbingan latihan kerja yang berupa pengelolaan APBD dan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan telah di realisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan akan tetapi pemerintah Desa juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena pemerintah Desa masih membutuhkan bantuan berupa fasilitas.

Namun berdasarkan dari beberapa informan masyarakat desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima hal ini memang sudah diwujudkan oleh pemerintah Desa, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus di perhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu proses mengelolah sumber daya diharapkan lebih baik. Hal ini disebabkan pemerintah Desa tidak dapat melihat atau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Adapun keinginan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat mengatasi hal tersebut dengan cara terjun langsung kedalam ruang lingkup masyarakat dan mendengarkan atau mempertimbangkan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat Desa.

Kedua, berdasarkan indikator peningkatan penghasilan, menurut beberapa informan pemerintah desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sudah diterima dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dari itu menurut informan kepala Desa Ngali penghasilan tunjangan masih belum diterima atau masih tertunda. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah Desa. Hal ini dihimbau dari beberapa informan kepada pemerintah Desa dengan harapan agar dapat bekerja lebih profesional serta maksimal, dan harapan lainnya juga dititipkan kepada pemerintah pusat untuk dapat melihat dan mengatasi beberapa persoalan yang terjadi dalam pemerintah Desa.

Selanjutnya, berdasarkan indikator sarana dan prasarana, menurut informan pemerintah Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima bahwa ada beberapa sarana dan prasarana desa sudah lengkap. Menurut informan dari masyarakat Desa, sarana dan prasarana yang ada di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima masih butuh diperhatikan dan sangat diperlukan. Maka besar harapan adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk meninjau lokasi yang sedang membutuhkan bantuan, sehingga pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Permintaan pelayanan kepada masyarakat akan selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitas seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perubahan lingkungan.

Pemerintah Desa seharusnya dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat perlu adanya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam

membangun serta memajukan desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalangan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

Dalam hal ini pemerintah juga harus jeli melihat sumber daya alam yang semakin langka keberadaannya serta turun langsung mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Maka dari itu pemerintah pusat harus memberikan bimbingan latihan kerja kepada aparat Desa guna maksimal dalam

melaksanakan tanggung jawabnya serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Dalam aspek kinerja, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat seharusnya memberikan penghargaan pada tiap unit pelayanan yang dianggap telah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Desa. Hal ini juga tidak terlepas dari semangat kerja dari Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar lebih giat dan antusias sehingga penyelesaian pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Dan pemerintah pusat juga harus memperhatikan lagi ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, supaya dapat membantu pemerintah Desa dalam bekerja

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai "Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima" adalah pemberdayaan pemerintah desa masih belum maksimal dalam rangka pelayanan masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa juga menjadi kendala karena jarang pemerintah desa untuk turun langsung ke-dalam ruang lingkup masyarakat dan mendengarkan atau mempertimbangkan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut, hendaknya kepala desa selaku pemimpin desa dan perangkat desa melihat pentingnya manfaat pemberdayaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Perlunya produktifitas kerja seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan agar pemberdayaan pemerintah desa bekerja menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan H.M, 2007; Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Djaenuri, H M Aries. 1997. Manajemen Pelayan Publik, Jakarta : De Leon, George
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Rukminto, Adi Isbandi. 2003. "Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)". Jakarta : LPFE UI
- Wasistiono, Sadu. 2003. "Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Fokusmedia, Bandung.
- Yunus, Syarifudin. 2010. Jurnalistik terapan. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sumber lain:
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa.
- Pasal 1 Ayat 1,2 dan 3 (Ketentuan Umum), Pasal 4 (Peraturan Desa Bertujuan), Pasal 18 (Kewenangan Desa), Pasal 19 (Kewenangan Desa Meliputi), Pasal 5 (Kedudukan), Pasal 6 (Jenis Desa), Pasal 7 (Penataan Desa), Pasal 23 (Penyelenggra), Pasal 25 (Pemerintah Desa), Pasal 26 (Kepala Desa), Pasal 48 (Perangkat Desa), Pasal 49 (Tugas Perangkat Desa), Pasal 67 (Desa Memiliki Hak Dan Kewajiban),Pasal 68 (Masyarakat Memiliki Hak Dan Kewajiban).